

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan diplomatik adalah interaksi yang terjalin antara satu negara dengan negara lainnya dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara, termasuk kepentingan ekonomi, politik, serta keamanan dan pertahanan. Hubungan ini dapat terbentuk melalui kesepakatan yang telah disepakati oleh negara-negara berdaulat melalui perjanjian internasional. Penting untuk dicatat bahwa hubungan diplomatik tidak selalu berjalan dengan lancar, karena adakalanya perbedaan kepentingan bisa memicu konflik diplomatik antar negara.

Fenomena ini tidak terbatas pada satu kawasan tertentu, tetapi telah terjadi di seluruh dunia, termasuk di kawasan Teluk. Geografisnya, negara-negara di kawasan Teluk Persia adalah negara-negara Arab yang berada di sepanjang garis pantai Teluk Persia. Negara-negara ini meliputi Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Iran. Negara-negara Teluk ini memiliki kedekatan geografis dan identitas yang serupa, yang menjadi faktor yang menguatkan hubungan erat antara mereka, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Namun, meskipun kawasan ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, stabilitas politik di kawasan ini seringkali rentan dan gejolak.

Kawasan ini kerap menghadapi masalah politik, ekonomi, dan ideologis, baik dalam lingkup regional maupun internasional. Konflik diplomatik ditandai dengan terputusnya hubungan diplomatik antara negara-negara. Biasanya, pemutusan hubungan diplomatik adalah keputusan yang diambil oleh satu negara secara tunggal, tetapi dalam beberapa kasus, itu bisa menjadi tindakan yang diambil bersama-sama oleh sekelompok negara dalam suatu organisasi internasional atau di dalam suatu kawasan tertentu.

Dalam melaksanakan keputusan ini, negara yang memutuskan hubungan diplomatik harus segera menutup misi diplomatik nya di negara penerima, termasuk menarik kembali para diplomat nya. Ada berbagai alasan yang dapat menjadi pemicu pemutusan hubungan diplomatik. Banyak faktor yang bisa menjadi dasar bagi suatu negara untuk mengambil langkah ini, seperti dugaan pelanggaran terhadap perjanjian resmi yang telah ada, campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, atau tindakan yang dianggap dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara lain.

Timur Tengah merupakan wilayah yang terus-menerus terlibat dalam konflik, dan konflik bahkan perang tampaknya selalu dikaitkan dengan wilayah ini. Ini dapat dipahami melalui berbagai aspek, baik geografis, sejarah, maupun kekayaan alam yang ada di wilayah ini, yang menarik perhatian banyak pihak untuk menguasainya. Meskipun Timur Tengah sebenarnya memiliki nilai keagamaan yang signifikan sebagai tempat kelahiran agama-agama Samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak lagi menjadi prioritas utama. Faktor politik dominan atau konflik

kepentingan telah mengambil alih, yang mengakibatkan konflik yang berkelanjutan di Timur Tengah. Dalam konteks ini, kepentingan mengacu pada kepentingan nasional, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara.¹

Untuk memahami negara-negara di Timur Tengah, tidak cukup hanya mengkaji aspek kekuasaan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan peran ide dan konsep yang ada dalam wilayah ini. Wilayah Timur Tengah, yang memiliki fondasi Islam yang kuat, memerlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk menginterpretasikan perilaku negara-negara di dalamnya. Di sini, konsep kekuasaan dan identitas saling terkait. Sistem negara di Timur Tengah berbeda dengan model Westphalia yang umumnya diterima dalam politik internasional. Model Westphalia menekankan keselarasan identitas dengan kedaulatan, bangsa, dan negara sebagai landasan legitimasi bagi negara dan sistem politiknya. Namun, di Timur Tengah, terlihat dominasi identitas yang kuat baik di tingkat sub-negara maupun negara-negara supranasional.

Identitas-identitas ini berdampungan, saling menyatu, dan membatasi loyalitas masa terhadap negara tertentu, yang membedakan mereka dari negara lain atau tetangga mereka. Sub-negara seperti etnis, aliran keagamaan, atau kelompok Islam yang signifikan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk hubungan antar negara di wilayah Timur Tengah. Sebagai contoh, kita dapat melihat hubungan yang memburuk antara Arab Saudi dan Iran yang

¹ Rudy, J. W., Barrientos, R. M., & O'reilly, R. C. (2002). Hippocampal formation supports conditioning to memory of a context. *Behavioral neuroscience*, 116(4), 530.

dipengaruhi oleh perbedaan ideologi dan perbedaan latar belakang keagamaan yang mereka anut.

Ini adalah hal yang membedakan hubungan antara negara-negara Timur Tengah dengan negara-negara lainnya. Di wilayah ini, ada peran penting aktor lain yang memiliki potensi besar dalam memengaruhi dominasi kekuasaan, kedaulatan, dan menjadi ancaman regional bagi negara-negara pesisir Arab. Kelompok ekstremis Islam seperti Al-Qaeda, Hamas, dan ISIS memainkan peran penting dalam hubungan internasional di wilayah Timur Tengah.

Penting untuk diingat bahwa dalam kerangka hubungan internasional di Timur Tengah, fokus tidak hanya pada peran negara sebagai aktor utama. Kelompok ekstremis Islam yang memiliki pandangan radikal juga menjadi aktor yang signifikan yang memengaruhi dinamika interaksi antarnegara di wilayah ini. Sebagai contoh, keberadaan Al-Qaeda di Iran menciptakan ketakutan terhadap potensi kekuatan yang ada di balik kelompok ini, yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas regional di Timur Tengah.

Sejak dimulainya konflik pada tahun 2017, ketegangan antara Arab Saudi dan Qatar telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun pada dasarnya merupakan konflik regional, dampaknya dapat dirasakan di tingkat internasional, terutama dalam hal stabilitas wilayah dan dinamika kebijakan luar negeri global. Konflik ini adalah salah satu konflik geopolitik yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir, melibatkan ketegangan politik, ekonomi, dan diplomatik antara kedua negara beserta sekutu-sekutu

mereka. Konflik antara Arab Saudi dan Qatar tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang yang mencakup perselisihan perbatasan dan ketegangan politik regional di masa lalu. Akar konflik ini sangat beragam, termasuk perbedaan dalam pandangan politik dan ideologi regional, dukungan Qatar terhadap kelompok-kelompok Islamis, persaingan antara Arab Saudi dan Iran, serta masalah-masalah regional seperti blokade yang diberlakukan oleh negara-negara yang mendukung Arab Saudi. Media juga memainkan peran penting dalam konflik ini, dengan peran Al Jazeera, stasiun berita berbasis di Qatar, menjadi elemen signifikan dalam ketegangan. Dampak konflik ini tidak hanya bersifat politik dan ekonomi, tetapi juga berdampak secara sosial. Masyarakat Qatar menghadapi isolasi regional yang mempengaruhi aspek perdagangan, transportasi, dan ketergantungan ekonomi pada negara-negara tetangga. Selain itu, konflik ini juga mengakibatkan pemisahan keluarga dan ketidakpastian akan masa depan, yang semuanya merupakan dampak serius bagi masyarakat Qatar.

Konflik antara Arab Saudi dan Qatar memiliki dampak yang meluas dan kompleks, dan pemahaman yang mendalam tentang akar penyebab dan implikasi dari konflik ini sangat penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Pada tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yaman, Libya, dan Maladewa mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Alasan di balik pemutusan hubungan tersebut adalah persepsi bahwa Qatar mendukung aktivitas kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk Ikhwanul Islam, yang oleh negara-negara tersebut dianggap sebagai

kelompok teroris. Arab Saudi dan sekutunya mengajukan 13 tuntutan sebagai syarat untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain meliputi mengurangi hubungan dengan Iran, menghentikan pembangunan pangkalan militer Turki di Qatar, menghentikan dukungan terhadap terorisme dan kelompok ideologis, serta menghentikan aktivitas kantor berita Al Jazeera. Qatar menolak tuntutan-tuntutan tersebut, yang memunculkan kekhawatiran bahwa krisis diplomatik ini dapat berkembang menjadi Krisis Teluk yang melibatkan konflik terbuka. Salah satu langkah yang diambil oleh Qatar adalah mencabut larangan yang diberlakukan oleh Arab Saudi terhadap pengembangan ladang gas bersama dengan Iran. Langkah ini memerlukan kerja sama antara kedua negara tersebut. Situasi ini semakin memperkompleks perselisihan ketika Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin yang diasingkan di bawah kepemimpinan Mohammed Morsi, sementara negara-negara Arab mendukung Hosni Mubarak dan mendukung Abdel Fattah El Sisi setelah kudeta di Mesir pada tahun 2013. Qatar juga dituduh mendukung dan mensponsori terorisme. Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC) melihat Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman karena secara ideologis mereka menentang kekuasaan turun-temurun.

Tindakan pertama yang diambil oleh Arab Saudi bersama dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab adalah menarik Duta Besar mereka dari Doha. Selain itu, mereka mengancam akan mengambil tindakan yang lebih drastis dengan menutup perbatasan dan ruang udara. Tindakan penarikan Duta Besar

ini diambil karena ketiga negara tersebut tidak lagi dapat menerima dukungan yang diberikan oleh Qatar kepada Ikhwanul Muslimin. Mereka melihat ini sebagai campur tangan Qatar dalam urusan internal mereka. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh latar belakang politik, sosial, teologi, dan kebijakan antara keempat negara ini, yang menyebabkan perbedaan persepsi terhadap Ikhwanul Muslimin. Beberapa negara ini menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan keberlanjutan negara mereka. Hal ini juga terkait dengan perbedaan pendekatan dalam kebijakan keamanan. Arab Saudi dan beberapa negara Teluk fokus pada pertahanan internal mereka dengan pembentukan pasukan keamanan berlapis untuk melindungi keamanan dalam negeri serta menekankan pada upaya antiterorisme. Mereka juga mengarahkan upaya militer mereka pada ancaman eksternal yang berasal dari Iran, Iraq, dan Yaman, dengan fokus pada pengembangan militer dan pertahanan udara. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengancam untuk melanjutkan boikot terhadap Qatar jika Qatar tidak mematuhi permintaan mereka. Kedua negara ini menuntut agar Qatar memutuskan semua hubungan dan menghentikan dukungan finansial kepada semua kelompok teroris.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain telah mengambil langkah-langkah tegas dengan melakukan blokade yang mencakup seluruh perbatasan Qatar serta penutupan jalur darat, laut, dan udara. Mesir, sebagai bagian dari tindakan ini, juga memblokir lintas udara Qatar, sehingga melarang Qatar Airways untuk melewati wilayah udaranya. Keputusan ini telah

memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial di Qatar. Tujuan utama dari blokade ini adalah untuk memberikan tekanan kepada Qatar dan mendorongnya untuk kembali bekerjasama dengan negara-negara Teluk lainnya serta memutuskan hubungannya dengan Iran. Namun, pada kenyataannya, tindakan ini justru menghasilkan efek sebaliknya. Hubungan antara Qatar dan Iran semakin erat karena Iran memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar Qatar yang terganggu akibat blokade yang diberlakukan oleh negara-negara ini.

Ekonomi Qatar mengalami dampak negatif akibat pemberlakuan sanksi politik dan perdagangan. Penutupan jalur perdagangan darat, laut, dan udara berdampak pada pasokan bahan pangan dari Arab Saudi. Karena Qatar tidak merupakan produsen pangan, penghentian pasokan pangan mengakibatkan gejolak di pasar konsumen dengan kenaikan harga pangan yang drastis dan penurunan stok. Selain itu, krisis pangan juga muncul karena Qatar sangat bergantung pada Arab Saudi sebagai satu-satunya pemasok makanan. Dengan demikian, keadaan ekonomi Qatar terlihat mengalami keruntuhan.

Namun, Qatar tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi tersebut. Negara ini telah melakukan beberapa upaya untuk menghidupkan kembali perekonomiannya. Pemblokiran terhadap Qatar telah mempengaruhi pasokan barang dan jasa, yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi bisnis di negara-negara GCC. Bank-bank dari negara-negara yang memberlakukan embargo juga menarik simpanan dan mengurangi hubungan bisnis dengan Qatar. Selain itu, bank-bank internasional menjadi lebih berhati-hati dalam

berbisnis dengan Qatar, dan beberapa perusahaan multinasional enggan berinvestasi atau membuka cabang di wilayah yang politiknya tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, HSBC mengabaikan kesepakatan besar dalam obligasi dolar baru Qatar

Pada 27 November 2017, Menteri Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan Iran Mohammad Shariatmadari dan Menteri Ekonomi dan Perdagangan Qatar Syekh Ahmad Bin Jassim Bin Mohammed Al Thani menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama untuk jalur perdagangan baru antara Qatar dan Turki dengan transit melalui Iran.²

Rute baru ini akan secara signifikan mengurangi biaya transportasi barang sekitar 80 persen dibandingkan dengan kargo udara. Biaya pengiriman udara berkisar antara 1,2 USD dan 1,5 USD per/kg, sementara itu biaya transportasi darat per/kg kira-kira 0,15 USD. Jalur perdagangan baru akan lebih berkelanjutan dan dapat meningkatkan volume perdagangan bilateral Turki-Qatar.³

Qatar menolak untuk patuh terhadap Arab Saudi. Qatar beranggapan bahwa Arab Saudi mencoba untuk mendominasi kawasan dan menuding semua tuntutan Arab Saudi tersebut sebagai sesuatu yang tidak mendasar.

² Tehran, Times (2017). *Iran, Turkey, Qatar ink transit co-op MOU*. Diakses dari: <https://www.tehrantimes.com/news/418820/Iran-Turkey-Qatar-ink-transit-co-op-MOU>. Diakses pada 15 November 2021

³ Mohammad, Shoeb. *Qatar-Turkey trade route via Iran to cut transportation cost*. Diakses dari: <https://www.thepeninsulaqatar.com/article/13/08/2017/Qatar-Turkey-trade-route-via-Iran-to-cuttransportation-cost>. pada 15 November 2021

Qatar menolak untuk patuh terhadap Arab Saudi dan menganggap bahwa Arab Saudi berusaha mendominasi kawasan tersebut. Qatar juga menuduh bahwa semua tuntutan yang diajukan oleh Arab Saudi tidak memiliki dasar yang kuat dan relevan. Dalam hal geografi dan demografi, Qatar adalah negara yang relatif kecil dibandingkan dengan tetangganya, Arab Saudi dan Iran. Kondisi ini memaksa Qatar untuk lebih memprioritaskan tindakan diplomasi yang berhati-hati guna menjaga keamanan nasional dan kepentingannya.

Sebelum terjadinya krisis antara Qatar dan Arab Saudi, Qatar bekerja sama dan memiliki pandangan yang sejalan dengan Arab Saudi dalam sejumlah isu regional seperti Suriah dan Yaman. Selain itu, Qatar juga mendorong dialog yang lebih luas antara negara-negara GCC dan Iran.

Menurut penulis, jika Qatar mematuhi permintaan Arab Saudi, maka ada kemungkinan bahwa Qatar akan terus menjadi bayangan Arab Saudi dan tidak dapat bersikap bebas dan independen di masa depan. Oleh karena itu, Qatar menolak untuk mematuhi persyaratan tersebut demi memperkuat kedaulatan negaranya. Menurut penulis, persyaratan tersebut bertujuan untuk melanggar kebebasan dan kedaulatan Qatar dengan menekan kebebasan berekspresi dan memberlakukan mekanisme pemeriksaan dan kontrol terhadap Qatar. Selain itu, penulis juga meyakini bahwa tatanan dunia diatur oleh hukum internasional yang tidak membenarkan negara besar menindas negara kecil.⁴

⁴ Febriandi, F. (2018). Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(1), 1-13.

1.2 Rumusan Masalah

Qatar menolak semua tuntutan yang diberikan oleh Arab Saudi yang menyebabkan semakin buruknya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar dan juga negara-negara GCC yang menyebabkan sanksi politik, ekonomi, dan pemblokiran wilayah. Konflik ini memiliki dampak regional yang signifikan, termasuk ketegangan di antara negara-negara GCC lainnya. Yang memperumit upaya penyelesaian dan memengaruhi stabilitas regional. Semakin buruknya hubungan diplomatik ini maka diperlukan rekonsiliasi dan mediasi antara Arab Saudi dan juga Qatar untuk menyudahi konflik dan menuju perdamaian yang diharapkan berlangsung secara permanen. Dalam penelitian ini Penulis meninjau bagaimana penyelesaian konflik antara Qatar dan Arab Saudi dapat diselesaikan. Peran aktor eksternal seperti Kuwait, Oman, dan GCC akan memainkan peran penting dalam permasalahan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Qatar dan Arab Saudi berkonflik dan sejauh mana konflik tersebut.
2. Bagaimana respon dan sikap Qatar terhadap tuntutan dan upaya penyelesaian konflik yang diajukan oleh Arab Saudi dan negara-negara GCC lainnya?
3. Apa peran aktor eksternal, seperti Kuwait, Oman, dan GCC dalam upaya mediasi dan penyelesaian konflik Arab Saudi selama periode tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya negara-negara Teluk dalam konflik Qatar dan Arab Saudi agar konflik ini tidak berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang dihasilkan dari upaya negara-negara teluk dalam kasus konflik Qatar dan Arab Saudi ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan terdiri dari lima bab, dengan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan topik yang dibahas. Berikut adalah sistematika penulisan tersebut..

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam Bab I, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini, kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Terakhir, penulis akan menjelaskan secara singkat sistematika penulisan, yaitu bagaimana penulisan ini akan disusun dan dibagi ke dalam bab-bab dan subbab-subbab yang relevan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam Bab II, penulis akan melakukan literature review yang melibatkan tinjauan literatur terkait dengan topik penelitian. Penulis akan menyajikan kerangka pemikiran yang mencakup teori-teori yang relevan dan konseptual yang

mendukung penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan menggabungkannya dengan teori-teori yang relevan untuk mengarahkan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III, penulis akan mengulas jenis penelitian yang dilakukan, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, teknik analisis data yang digunakan, serta pemilihan waktu dan lokasi penelitian. Penulis akan memberikan penjelasan mendalam mengenai metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan alasan di balik pemilihan waktu dan lokasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Di dalam Bab IV, penulis akan membahas hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi kondisi dari konflik Qatar dan Arab Saudi serta bagaimana negara-negara GCC membantu konflik tersebut. Penulis akan menguraikan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data dan mengaitkannya dengan tujuan penelitian. Penulis juga akan menjelaskan secara mendalam mengenai kondisi konflik Qatar dan Arab Saudi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi konflik negara tersebut, dan tantangan yang dihadapi dalam konteks konflik Qatar dan Arab Saudi.

BAB V

BAB ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup dari seluruh penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait akan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini akan menjadi akhir dalam skripsi, yang berisi tentang referensi atau daftar pustaka

